

Formulasi Kebijakan Akselerasi Rata-Rata Lama Sekolah (RLs) Di Kabupaten Muara Enim

Yulia Fitriani¹, Royda², Purnomo³, Sardin⁴, Iip Saripah⁵,
Pandu Hyangsewu⁶, Ade Romi Rosmia⁷

yu.liasyamsul83@gmail.com¹, roydafauzi@gmail.com², purnomo@upi.edu³, sardin@upi.edu⁴
iip_saripah@upi.edu⁵, hyangsewu@upi.edu⁶, aderomirosmia@student.upi.edu⁷

* Correspondence Author: yu.liasyamsul83@gmail.com

Balitbangda Kabupaten Muara Enim^{1,2}, Universitas Pendidikan Indonesia^{3,4,5,6,7}

Abstrak

Pendidikan sangat penting untuk mengembangkan sumber daya manusia dan pertumbuhan sosial ekonomi suatu wilayah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu cara untuk mengukur pembangunan manusia dilihat dari lamanya penduduk usia 25 tahun menyelesaikan pendidikan. Studi ini berfokus pada Kabupaten Muara Enim, yang memiliki RLS yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional dan provinsi, dengan tujuan mengevaluasi kebijakan yang dapat mempercepat peningkatan RLS. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-eksploratori, dengan proses pengumpulan data melalui studi dokumentasi (RLS, kemiskinan, pendidikan, fasilitas sekolah yang berasal dari BPS), wawancara/FGD, dan observasi lapangan terbatas di enam kecamatan yang dijadikan sampel untuk mewakili daerah tersebut. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kebijakan berbasis wilayah harus mencakup pengembangan infrastruktur pendidikan, peningkatan pemberdayaan gender, dan revitalisasi pendidikan vokasi dan nonformal untuk mendorong Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Muara Enim berada di Kuadran II (Kemiskinan Relatif Rendah, RLS Rendah), menunjukkan bahwa masalah utama yang menghambat peningkatan RLS adalah kendala struktural sisi penawaran (supply-side) atau kurangnya sekolah, bukan keterbatasan ekonomi rumah tangga. Kesimpulan penelitian ini menyajikan usulan kerangka kebijakan tiga pilar, yaitu Pilar Spasial (Membangun Satuan Sekolah Baru/Sekolah Satu Atap dan memastikan daerah tertinggal menerima transportasi gratis), Pilar Gender dan Kapabilitas (advokasi anti pernikahan dini dan beasiswa tindakan afirmatif), dan Pilar Non-Formal (revitalisasi PKBM digital dan integrasi pendidikan kesetaraan dan pelatihan vokasi untuk orang dewasa).

Kata Kunci : Kebijakan Pendidikan, Akselerasi Pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Abstrack

Education is crucial for developing human resources and socio-economic growth in a region. Mean Years of Schooling (MES) is one measure of human development, measured by the number of years a population aged 25 has completed school. This study focuses on Muara Enim Regency, which has a lower MES than the national and provincial averages, with the aim of evaluating policies that can accelerate the improvement of MES. This research method uses a qualitative-exploratory approach, with data collection through documentation studies (MES, poverty, education, school facilities obtained from the Statistics Indonesia), interviews/FGDs, and limited field observations in six sample sub-districts representing the region. The results of this study indicate that area-based policies should include the development of educational infrastructure, increased gender empowerment, and the revitalization of vocational and non-formal education to encourage a more inclusive and sustainable MES. Muara Enim is in Quadrant II (Low Relative Poverty, Low MES), indicating that the main problem hindering the improvement of MES is supply-side structural constraints or the lack of schools, rather than household economic limitations. The conclusion of this study presents a proposed three-pillar policy framework: the Spatial Pillar (Building New School Units/One-Roof Schools and ensuring free transportation in disadvantaged areas), the Gender and Capability Pillar (advocating against early marriage and affirmative action scholarships), and the Non-Formal Pillar (revitalizing digital PKBM and integrating equivalency education and vocational training for adults).

Keywords: Education Policy, Education Acceleration, Average Years of Schooling (RLS).

PENDAHULUAN

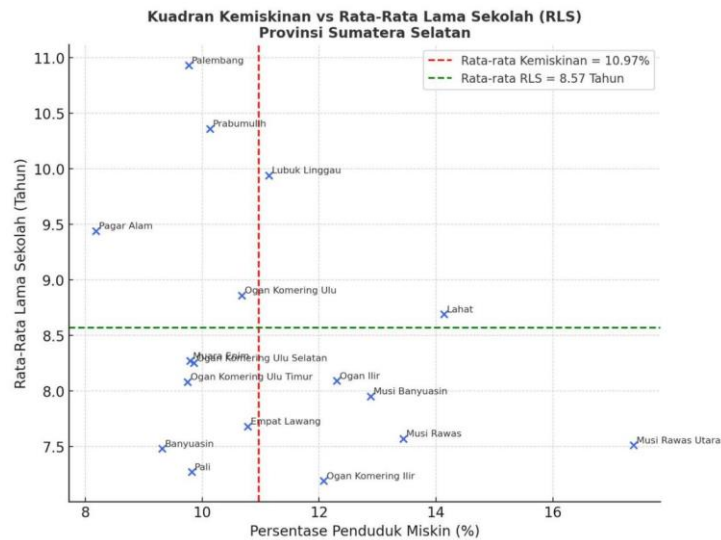
Pendidikan merupakan bagian penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan ukuran penting pembangunan manusia. RLS menunjukkan lamanya pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS juga merupakan bagian penting dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Anggraeni, W, 2022).

RLS berfungsi sebagai proksi sekaligus prediktor signifikan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, sejalan dengan Teori Modal Manusia (Baharin, 2020). Investasi dalam pendidikan formal telah terbukti memberikan dampak positif yang substansial bagi individu dan masyarakat luas (Apergis, N dkk, 2022). Dengan demikian, skor RLS yang rendah di Kabupaten Muara Enim dibandingkan dengan wilayah sekitarnya dan rata-rata provinsi dapat berarti bahwa sumber daya manusia akan kurang produktif dan kompetitif di masa mendatang. Untuk mempercepat RLS, kita perlu mencermatinya lebih dekat, bukan hanya bagaimana meningkatkan angka-angka tersebut, tetapi juga bagaimana memperbaiki permasalahan yang sudah ada. Menurut BPS (2024), Angka Prestasi Pendidikan (APT) nasional Indonesia adalah 8,73 tahun. Ini berarti bahwa sebagian besar penduduk di negara ini hanya menyelesaikan sekolah menengah pertama. Di Kabupaten Muara Enim, APT adalah 8,27 tahun (BPS, 2024), yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya tetapi masih lebih rendah dari rata-rata nasional dan provinsi sebesar 8,57 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Muara Enim tidak menyelesaikan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Ada banyak faktor struktural, geografis, ekonomi, dan sosial budaya yang memengaruhi APT di Kabupaten Muara Enim. Kabupaten ini memiliki banyak wilayah yang berbeda, dari daerah pertambangan industri (Lawang Kidul) hingga daerah pedalaman dan pesisir (Muara Belida dan Panang Enim).

Perbedaan-perbedaan ini memiliki efek langsung pada jumlah sekolah yang ada, seberapa baik guru-gurunya, dan seberapa jauh sekolah-sekolah tersebut. Ketimpangan gender merupakan masalah besar, terbukti dari angka RLS (*Revenue of Labour*) untuk laki-laki yang mencapai 8,68 tahun, sementara perempuan hanya 7,72 tahun. Hal ini menunjukkan adanya hambatan sosial budaya, termasuk perspektif konvensional tentang tanggung jawab doRLStik dan pernikahan dini. Penelitian sebelumnya, termasuk studi di Sumatera Selatan (Priambada, G. A, 2024), secara konsisten menunjukkan bahwa variasi RLS di tingkat kabupaten atau kota dipengaruhi oleh disparitas ketersediaan infrastruktur pendidikan menengah dan faktor sosial budaya yang menghambat partisipasi (Haidir dkk, 2023; Hanif & Rijal, 2024). RLSkipun demikian, penelitian yang berfokus pada Kuadran Kemiskinan-RLS di Muara Enim dan korelasinya dengan Kebijakan Berbasis Wilayah masih terbatas. Studi ini menggunakan

Pendekatan Kemampuan (Krishnan, S., & Mohanty, N, 2020) untuk menilai pendidikan dan mengkaji kebebasan individu (terutama perempuan) untuk mengakses dan memperoleh manfaat dari pendidikan, sebuah isu sentral dalam mengatasi disparitas gender dan spasial. Di beberapa daerah, seperti Muara Enim, Banyuasin, Ogan Komering Ulu Timur, Empat Lawang, dan Pali, tingkat kemiskinan rendah, tetapi skor RLS masih di bawah rata-rata (Sardin, dkk 2025). Hal ini menunjukkan bahwa masalah utamanya bukanlah keterbatasan ekonomi dalam rumah tangga, melainkan kurangnya ketersediaan pendidikan (sisi penawaran). Di daerah ini, fasilitas sekolah menengah atas tidak tersebar merata, yang berarti jumlah siswa tidak mencukupi dan sekolah terlalu jauh. Kurikulum juga tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga beberapa siswa menganggap pendidikan formal tidak penting. Kualitas pendidikan juga sangat penting karena

kurangnya guru yang berkualifikasi, ruang belajar, atau fasilitas pendukung. Jadi, meskipun tingkat kemiskinan rendah, RLS belum membaik. Faktor utama dalam kuadran ini bukanlah situasi ekonomi keluarga, melainkan akses dan kualitas layanan pendidikan. Peran perantara yang penting termasuk memastikan ketersediaan sekolah menengah atas, program kejuruan, pemerataan pendidikan, dan transportasi siswa.



Gambar 1. Analisis Data RLS dengan Data Kemiskinan Berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Gambar 1, menunjukkan bahwa Kabupaten Muara Enim dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu: Pertama, penting untuk mengetahui faktor-faktor spesifik apa yang menghambat terjadinya RLS. Hal ini karena Muara Enim berada di Kuadran II, yang berarti masalah utamanya terletak pada sisi penawaran, bukan hanya kemiskinan. Kedua, perbedaan RLS yang hampir satu tahun antara laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa sistem pendidikan belum memberikan akses yang setara kepada perempuan. Ini berarti bahwa afirmasi kebijakan yang telah diterapkan perlu ditinjau kembali untuk melihat seberapa efektifnya. Ketiga, hal ini penting karena meletakkan dasar bagi saran kebijakan berbasis bukti yang dapat diadaptasi dengan kebutuhan unik dari enam kecamatan sampel (industri, agraris, dan terpencil). Dengan demikian, upaya percepatan peningkatan RLS dapat dilakukan secara terarah, inklusif, dan berkelanjutan, dengan sasaran tercapainya target RLS 8,7 tahun pada tahun 2026. Penelitian ini difokuskan pada perumusan kebijakan untuk mitigasi disparitas spasial dan pencapaian kesetaraan gender, yang bertujuan untuk mempercepat peningkatan RLS di Kabupaten Muara Enim secara berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Peningkatan RLS dianggap sebagai investasi penting dalam modal manusia (human capital), yang berhubungan langsung dengan peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (Baharin dkk, 2020; Kanval dkk, 2024). Namun, dalam menghadapi ketidaksetaraan, pendekatan Capability Approach dari Amartya Sen (Krishnan & Mohanty, 2020) sangat relevan. Perspektif ini melihat pendidikan bukan hanya sebagai sarana ekonomi, tetapi sebagai kebebasan substansial (*substantive*

freedom) bagi individu untuk mencapai kesejahteraan dan berpartisipasi dalam masyarakat, yang sangat penting dalam menganalisis kesenjangan gender dan disparitas regional.

Keputusan individu untuk melanjutkan pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Secara eksternal, hambatan yang paling signifikan seringkali berasal dari masalah supply-side atau ketersediaan layanan pendidikan (UNESCO, 2020). Penelitian di Indonesia mengungkapkan bahwa aksesibilitas fisik, terutama ke jenjang SMA/SMK di daerah pedesaan, menjadi hambatan utama dalam peningkatan RLS (Haidir & Setyari, 2023; Hanif & Rijal, 2024). Kendala geografis dan jarak tempuh terbukti menghambat kelanjutan pendidikan di daerah pedesaan dan terpencil (Anggraeni, 2022). Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas layanan pendidikan, termasuk ketersediaan guru yang berkualifikasi dan fasilitas belajar, memiliki dampak besar terhadap pembangunan modal manusia (Kanval dkk, 2024), yang menggeser fokus dari kuantitas menuju kualitas (Raikes dkk, 2023).

Disparitas RLS juga diperburuk oleh faktor sosio-kultural dan ekonomi antargenerasi. Pendidikan orang tua memengaruhi keputusan pendidikan anak (Anggraeni, 2022), sementara kemiskinan dapat menciptakan siklus yang berulang (Haidir & Setyari, 2023). Kesenjangan gender dalam RLS yang semakin lebar sebagian besar disebabkan oleh faktor non-ekonomi, seperti pandangan sosial yang lebih mengutamakan peran domestik perempuan, yang mengarah pada pernikahan usia dini dan putus sekolah pada anak perempuan (Mulyana, 2020; Yoshida dkk, 2022; Damayanti & Ni'mah, 2023). Oleh karena itu, strategi akselerasi RLS di wilayah seperti Muara Enim perlu melampaui sekadar bantuan biaya, dengan fokus pada perbaikan struktural dalam layanan pendidikan dan pengarusutamaan gender. Bagi penduduk dewasa yang telah putus sekolah, pendekatan *Educational Attainment* yang diperkuat melalui pendidikan vokasional (Purnomo dkk, 2024; Hufad dkk, 2024) serta peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam menyediakan pendidikan kesetaraan yang fleksibel terbukti efektif dalam meningkatkan RLS di kalangan usia produktif (Agista & Hendrawati, 2025; Hufad dkk, 2024). Kajian regional juga menunjukkan bahwa disparitas RLS di Sumatera Selatan sangat terkait dengan perbedaan infrastruktur antarwilayah, yang menekankan pentingnya kebijakan berbasis lokal (Sardin dkk, 2025).

METODE PENELITIAN

Fokus masalah pada penelitian ini adalah merumuskan kebijakan untuk mitigasi disparitas spasial dan pencapaian kesetaraan gender, yang bertujuan untuk mempercepat peningkatan RLS di Kabupaten Muara Enim secara berkelanjutan, berikut merupakan metode penelitian yang diterapkan.

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain eksploratif yang didukung oleh data hasil wawancara, focus group discussion, dokumentasi dan observasi (Johnson, J. L, 202). Pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan

data berfungsi sebagai alat triangulasi serta pendalaman analisis. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai hambatan struktural, nilai-nilai budaya, dan persepsi para pemangku kepentingan terhadap kebijakan pendidikan.

2. Lokasi dan Informan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Unit analisis spasial utama terdiri dari enam kecamatan yang dipilih dengan teknik purposive sampling untuk merepresentasikan variasi wilayah yang ekstrem: Lawang Kidul (industri), Tanjung Agung (campuran), Gelumbang (agraris), Panang Enim (pedalaman), Muara Belida (perairan), dan Sungai Rotan (semi-perkotaan). Informan kunci dalam penelitian kualitatif meliputi berbagai pemangku kepentingan pendidikan, seperti perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Pendidikan, Bappeda, Balitbangda), kepala sekolah dan guru dari tingkat SMP serta SMA/SMK di wilayah sampel, serta tokoh masyarakat dan perwakilan desa, dengan total keseluruhan 11 orang. Pemilihan informan dilakukan untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas mengenai isu-isu terkait akses pendidikan, kualitas layanan, dan kesenjangan gender dalam RLS.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan utama: (a) Studi Dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder kuantitatif, seperti RLS, IPM, fasilitas sekolah, dan tingkat kemiskinan, yang diperoleh dari BPS dan OPD terkait; (b) Wawancara Kelompok/FGD untuk memperoleh data primer kualitatif mengenai persepsi, hambatan, dan efektivitas program yang ada; dan (c) Observasi Lapangan Terbatas untuk memvalidasi kondisi fisik sarana pendidikan serta mengidentifikasi aksesibilitas wilayah

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan utama: (a) Studi Dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder kuantitatif, seperti RLS, IPM, fasilitas sekolah, dan tingkat kemiskinan, yang diperoleh dari BPS dan OPD terkait; (b) Wawancara Kelompok/FGD untuk memperoleh data primer kualitatif mengenai persepsi, hambatan, dan efektivitas program yang ada; dan (c) Observasi Lapangan Terbatas untuk memvalidasi kondisi fisik sarana pendidikan serta mengidentifikasi aksesibilitas wilayah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya percepatan peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Muara Enim memerlukan kebijakan yang berfokus pada jangka panjang, inklusif, dan adaptif, dengan mempertimbangkan kondisi geografis, sosial-ekonomi, serta kesenjangan gender yang masih ada.

Pada tahun 2024, RLS Kabupaten Muara Enim tercatat sebesar 8,27 tahun, menempatkannya di urutan ke-7 dalam Provinsi Sumatera Selatan, RLS masih di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 8,57 tahun. Capaian ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk dewasa di Muara Enim belum menyelesaikan pendidikan hingga

jenjang SMA/SMK. Kesenjangan RLS antara jenis kelamin mencapai 0,96 tahun (Laki-laki: 8,68 tahun; Perempuan: 7,72 tahun).

Kesenjangan gender yang signifikan ini, hampir satu tahun penuh, mencerminkan tantangan sosial-budaya yang besar, terutama di kecamatan agraris dan pedalaman, yang dipengaruhi oleh pandangan tradisional serta tingginya angka pernikahan usia dini (Damayanti dkk, 2023). Selain itu, disparitas spasial juga sangat terlihat, yaitu Lawang Kidul sebagai kawasan industri, memiliki RLS tertinggi, jauh di atas kecamatan periferal seperti Panang Enim dan Muara Belida.

Analisis kuadran Kemiskinan vs RLS menempatkan Kabupaten Muara Enim di Kuadran II (Kemiskinan Relatif Rendah, RLS Rendah). Interpretasi Kuadran II mengindikasikan bahwa masalah utama yang menahan peningkatan RLS bukanlah pada keterbatasan ekonomi keluarga (*demand-side*), melainkan pada kendala struktural penawaran pendidikan (*supply-side*). Temuan ini sejalan dengan penelitian (Haidir dkk, 2023; Hanif & Rijal, 2024) yang menunjukkan bahwa di daerah perdesaan, akses fisik ke sekolah menengah memiliki pengaruh yang lebih besar daripada faktor biaya.

Kendala *supply-side* di Muara Enim dimanifestasikan melalui: (a) Transisi Ketidakseimbangan Satuan: Ketidakseimbangan antara jumlah SD yang banyak dengan keterbatasan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) yang terpusat di wilayah urban/industri, memaksa siswa di daerah terpencil untuk berhenti sekolah (Sardin, dkk 2025). (b) Hambatan Geografis: Kondisi perbukitan dan perairan (misalnya di Muara Belida) menyebabkan mobilitas dan pembangunan infrastruktur sulit, yang secara konsisten diidentifikasi sebagai penghambat utama kelanjutan sekolah (Sardin, 2025).

Dari sisi evaluasi, kebijakan Pemerintah Kabupaten Muara Enim tentang Program Wajib Belajar 12 Tahun dinilai cukup efektif dalam meningkatkan RLS secara absolut dan menekan angka putus sekolah. Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR), khususnya dari PT Bukit Asam, di Lawang Kidul terbukti memperkuat pendidikan vokasi dan kualitas guru (Ubihatun, R., 2024), namun upaya ini belum seluruhnya merata di seluruh wilayah.

1. Model Akselerasi Kebijakan Berbasis Bukti (Menjawab Rumusan Masalah)

Berdasarkan analisis Kuadran II, disparitas spasial, dan kesenjangan gender, model akselerasi kebijakan yang direkomendasikan harus beralih dari intervensi berbasis subsidi biaya ke perbaikan struktural layanan dan penguatan *human capability* (Krishnan, S., & Mohanty, N, 2020). Model ini diorganisasikan dalam tiga pilar kebijakan utama:

a. Pilar Spasial dan Pemerataan Akses (*Supply-Side Intervention*).

Pilar ini berfokus pada menutup kesenjangan infrastruktur fisik di daerah periferal yang disebabkan oleh Kuadran II. Solusi tidak hanya sebatas penambahan sekolah, tetapi pada penciptaan akses yang mudah dan terjangkau (Raikes, A., 2023; Priambada, G. A, 2024; Apergis, N, 2022). Upaya ini menargetkan wilayah Panang Enim, Muara Belida, dan Sungai Rotan.

- 1) Pembangunan *Unit Sekolah Baru* (USB) dan *Sekolah Satu Atap* (SATAP) di Daerah Prioritas: Prioritas harus diberikan pada kecamatan Panang Enim dan

Muara Belida untuk segera mengatasi *bottleneck* transisi SMP-SMA. Pembangunan harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal, misalnya sekolah terapung atau sekolah *semi-permanen* di area sulit akses.

- 2) Afirmasi Geografis dan Logistik: Penyediaan Asrama Pelajar dan Transportasi Sekolah Gratis di wilayah terpencil. Hal ini meminimalisir biaya tidak langsung dan hambatan jarak tempuh, yang terbukti menjadi faktor penentu kelanjutan sekolah (Anggraeni, 2022). Kebijakan ini juga harus mencakup Redistribusi Tenaga Pendidik dengan insentif khusus bagi guru berkualitas yang bersedia ditempatkan di wilayah 3T untuk memastikan kualitas pendidikan merata (Kanval, N, dkk, 2024).
- 3) *Area-Based Policy* Adaptif: Menerapkan strategi yang berbeda untuk setiap zona. Misalnya, *Industrial Learning Center* di Lawang Kidul untuk fokus vokasional dan *Sekolah Mandiri* berbasis kearifan lokal yang terintegrasi dengan balai desa di Muara Belida, sebagai respons terhadap hambatan geografis.

b. Pilar Penguatan Kapabilitas dan Kesetaraan Gender

Pilar ini diarahkan untuk mengatasi faktor non-ekonomi yang menahan RLS perempuan, sesuai dengan lensa *Capability Approach*.

- 1) Program Afirmatif Anak Perempuan: Implementasi Beasiswa yang terintegrasi dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini bertujuan memberikan dukungan finansial dan motivasi bagi anak perempuan dari keluarga miskin atau berisiko putus sekolah untuk melanjutkan ke jenjang menengah. Beasiswa ini harus diikat dengan syarat pencegahan pernikahan dini untuk memastikan keberlanjutan pendidikan, sekaligus menciptakan *role model* perempuan berpendidikan di tingkat komunitas. Intervensi ini sangat krusial mengingat tingginya kesenjangan gender RLS di Kabupaten Muara Enim.
- 2) Advokasi Anti-Pernikahan Dini: Kolaborasi yang intensif dan sinergis dengan tokoh agama, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Kementerian Agama (Kemenag) sangat diperlukan untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi harus dilakukan secara kultural, misalnya melalui pengajian atau forum adat desa, mengenai dampak buruk pernikahan usia dini terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi keluarga (Yoshida, 2022; Damayanti, 2023; Mulyana, 2020). Tujuannya adalah mengubah norma sosial dan pandangan tradisional yang menganggap peran RLS lebih penting daripada pendidikan formal bagi anak perempuan.
- 3) Penguatan Ekonomi Kreatif Perempuan: Mengintegrasikan pendidikan non-formal (PKBM) dengan pelatihan keterampilan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti Program Songket Muara Enim atau UMKM Digital. Strategi ini memberikan nilai tambah ekonomi pada pendidikan perempuan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan dukungan keluarga terhadap kelanjutan studi, karena pendidikan dipandang sebagai aset produktif. Pendekatan ini sejalan dengan *Capability Approach* (Krishnan, S., & Mohanty, N, 2020) karena tidak

hanya memberikan ijazah, tetapi juga memperluas kesempatan substantif perempuan untuk berpartisipasi dalam pasar kerja lokal.

c. Pilar Akselerasi Non-Formal dan Vokasi

Pilar ini ditujukan untuk penduduk usia produktif (18+) yang sudah terlanjur putus sekolah, untuk mempercepat kenaikan angka RLS secara agregat.

- 1) Perluasan Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C) berbasis blended learning melalui pengembangan Muara Enim Digital Learning Hub menjadi suatu keharusan. Pendekatan ini mengatasi kendala waktu dan jarak bagi pekerja muda atau ibu rumah tangga (Purnomo, dkk, 2024; Agista, W., & Hendrawati, T, 2025), karena memungkinkan mereka untuk belajar secara fleksibel tanpa mengganggu aktivitas ekonomi mereka. Pemanfaatan teknologi, seperti portal e-learning, juga dapat menjangkau wilayah dengan infrastruktur terbatas melalui penyampaian modul pembelajaran melalui radio komunitas, memastikan bahwa prinsip lifelong learning dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat (Purnomo, dkk 2024).
- 2) Model *Sekolah IPM*: Model ini merupakan terobosan untuk mengintegrasikan kebutuhan formal dan fungsional. Caranya adalah dengan mengintegrasikan perolehan ijazah kesetaraan dengan sertifikat kompetensi vokasional yang dibutuhkan industri lokal (Ubihatun, R, 2024). Dengan demikian, Model *Sekolah IPM* memberikan manfaat ganda: peningkatan RLS formal yang tercatat di BPS, dan peningkatan daya saing ekonomi melalui keterampilan praktis. Program ini harus disinergikan dengan kebutuhan sektor pertambangan dan agraris di Muara Enim, menjadikannya jembatan bagi lulusan dewasa non-formal menuju pekerjaan layak.
- 3) Task Force Akselerasi RLS: Pembentukan tim kerja lintas sektor ini sangat penting untuk memastikan tata kelola yang efektif dan akuntabel. Tim ini harus melibatkan Dinas Pendidikan, Bappeda, Dinas Tenaga Kerja, serta mitra industri (CSR) untuk memantau capaian RLS secara spasial dan memastikan alokasi sumber daya (input) diarahkan dengan tepat ke wilayah Kuadran II dan daerah dengan kesenjangan gender tertinggi. Model tata kelola kolaboratif ini memastikan perencanaan berbasis bukti yang berkelanjutan dan mencegah duplikasi program.

Dengan mengimplementasikan Model Akselerasi tiga pilar ini, Muara Enim dapat secara efektif mengatasi akar permasalahan RLS: menutup disparitas spasial melalui intervensi *supply-side* yang terfokus dan mengatasi kesenjangan gender melalui penguatan kapabilitas perempuan dan pencegahan pernikahan dini.

Tabel 1. Implementasi Kebijakan Pendidikan di Enam Kecamatan Kabupaten Muara Enim untuk Peningkatan RLS (2018–2023)

Kecamatan	Implementasi Kebijakan / Program Utama	Fokus Kebijakan & Aksi di Lapangan	Dampak terhadap RLS & Akses Pendidikan
Tanjung Agung	Pemerataan fasilitas pendidikan dasar dan menengah; penguatan pendidikan vokasi dan PKBM	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan SMP dan SMK negeri (SMKN 1 Tanjung Agung dengan 908 siswa). • Penguatan PKBM Mekar Sari & PKBM Nurul Hidayah untuk pendidikan kesetaraan. • Peningkatan kapasitas guru dan rombel (375 guru, 6.463 peserta didik). 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses pendidikan relatif baik di jenjang dasar-menengah. • Kontribusi PKBM cukup besar terhadap peningkatan RLS masyarakat dewasa. • Tantangan: distribusi guru belum merata di wilayah kebun & desa terpencil.
Panang Enim	Pemerataan pendidikan dasar; peningkatan daya tampung SMP; penambahan guru dan sarana dasar	<ul style="list-style-type: none"> • 9 SD Negeri dan 3 SMP Negeri aktif, total 1.951 peserta didik. • Pemerintah fokus menambah ruang kelas dan guru di sekolah kecil. • Peningkatan akses PAUD dan TK swasta (11 lembaga aktif). 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses dasar meningkat, tetapi belum ada SMA/SMK. Gap besar antara lulusan SMP dan daya tampung SMA menyebabkan RLS stagnan. • Diperlukan pembangunan SMA/SMK baru atau akses antar-kecamatan.
Lawang Kidul	Pusat kebijakan pendidikan perkotaan dan industri; kolaborasi CSR PTBA	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 51 satuan pendidikan formal (negeri dan swasta). • CSR PT Bukit Asam mendukung SMK, SMA, dan SD melalui bantuan laboratorium digital dan beasiswa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan dengan RLS tertinggi di kabupaten. • Akses pendidikan menengah dan vokasi luas. • Tantangan: kesenjangan sosial antara anak karyawan

Kecamatan	Implementasi Kebijakan / Program Utama	Fokus Kebijakan & Aksi di Lapangan	Dampak terhadap RLS & Akses Pendidikan
		<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan SMK berbasis tambang (SMK Bukit Asam & SMK Mutiara). 	<p>tambang dan masyarakat non-industri.</p>
Gelumbang	Penguatan pendidikan vokasi dan pemerataan kualitas guru	<ul style="list-style-type: none"> • 45 satuan pendidikan; SMKN 1 Gelumbang memiliki 1.188 siswa. • Penguatan pendidikan vokasional berbasis pertanian & industri. • Pelatihan kompetensi guru dan penggunaan media belajar digital. 	<ul style="list-style-type: none"> • RLS meningkat karena tingginya partisipasi SMK. • Tantangan: ketimpangan antara desa inti dan desa pemekaran. • Pendidikan vokasi relevan dengan kebutuhan lokal.
Muara Belida	Perluasan akses sekolah dan pemerataan tenaga pendidik di daerah perairan	<ul style="list-style-type: none"> • Akses pendidikan rendah (hanya 16 satuan pendidikan). • Pemerintah membangun sekolah dasar di desa perairan. • Program transportasi air untuk siswa SD dan SMP. 	<ul style="list-style-type: none"> • RLS paling rendah di kabupaten. • Jarak dan keterbatasan infrastruktur utama penyebab anak tidak melanjutkan sekolah. • Diperlukan intervensi spesifik: sekolah terapung atau e-learning jarak jauh.
Sungai Rotan	Pemerataan pendidikan menengah dan penguatan PKBM	<ul style="list-style-type: none"> • 28 satuan pendidikan; 6 SMP, 1 SMA, 1 SMK, dan 1 PKBM aktif. • SMAN 1 Sungai Rotan (658 siswa) menjadi pusat pendidikan menengah. • PKBM Cahaya Lematang aktif meningkatkan keaksaraan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses menengah meningkat, tetapi jarak sekolah masih jadi hambatan. • Perlu transportasi pelajar dan insentif guru daerah. • Kontribusi PKBM cukup signifikan terhadap peningkatan RLS dewasa.

Tabel 2. Ringkasan Implementasi Program Pendidikan di Enam Kecamatan (Fokus 2018–2023)

Aspek Kebijakan	Tanjung Agung	Panang Enim	Lawang Kidul	Gelumbang	Muara Belida	Sungai Rotan
Jumlah Satuan Pendidikan (SD–SMK)	25	14	51	45	9	28
Program Utama	Pembangunan SMK & PKBM	Perluasan SD–SMP	CSR & Beasiswa PTBA	Penguatan SMK & pelatihan guru	Transportasi air, akses dasar	Pembangunan SMA–SMK & PKBM
Akses Pendidikan Menengah	Tinggi (SMAN 1, SMKN 1)	Rendah (tanpa SMA/SMK)	Sangat tinggi	Tinggi	Terbatas	Sedang
Kehadiran PKBM	2 lembaga aktif	Minim	1 lembaga aktif	1 lembaga kecil	Belum ada	1 lembaga aktif
Tenaga Pendidik (Guru)	375	160	946	823	93	454
Tantangan Utama	Ketimpangan distribusi guru	Tidak ada SMA/SMK	Kesenjangan sosial industri	Desa baru kekurangan guru	Akses air & transportasi	Jarak dan biaya transportasi
Kontribusi terhadap RLS	Cukup tinggi	Rendah	Tertinggi	Cukup tinggi	Terendah	Sedang

Perbedaan implementasi kebijakan di 6 kecamatan menunjukkan perbedaan isu pendidikan dan kebijakan yang diterapkan di masing-masing kecamatan. Lawang Kidul merupakan kecamatan dengan persentase RLS tertinggi dan memiliki akses terbanyak ke pendidikan menengah dan kejuruan, dengan 51 satuan pendidikan, serta kerja sama sponsorship dengan PT Bukit Asam yang berfokus pada sekolah kejuruan pertambangan. Sebaliknya, kecamatan Muara Belida memiliki persentase RLS terendah di kabupaten tersebut dengan hanya 9 satuan pendidikan, dan merupakan wilayah utama yang memiliki akses air dan infrastruktur yang sedang diupayakan pemerintah untuk diatasi dengan sistem transportasi air bagi siswa sekolah. Kecamatan Tanjung Agung, Gelumbang, dan Sungai Rotan memiliki RLS sedang hingga tinggi dan sangat menekankan sistem sekolah kejuruan dan PKBM, yaitu Pusat Kegiatan Belajar, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendidikan orang dewasa buta huruf. Namun demikian, kecamatan-kecamatan ini menghadapi keterbatasan dalam hal distribusi guru yang tidak merata, ketimpangan pusat/kecamatan desa, serta jarak dan biaya transportasi sekolah.

Di sisi lain, Panang Enim menghadapi masalah krusial di tingkat pendidikan menengah. Meskipun terdapat 14 satuan pendidikan dan peningkatan akses ke pendidikan dasar, ketiadaan sekolah menengah atas (SMA/SMK) meninggalkan kesenjangan yang besar antara lulusan SMP baru-baru ini dan sekolah yang menerima siswa sekolah menengah, yang pada akhirnya mengakibatkan RLS yang rendah dan stagnan. Jumlah guru di Lawang Kidul (946) dan Gelumbang (823) secara signifikan lebih tinggi daripada di Muara Belida (93) dan Panang Enim (160), yang mencerminkan ketidakseimbangan sumber daya manusia di sektor pendidikan. Program inti di sebagian besar kecamatan berfokus pada perluasan akses sekolah dan penguatan pendidikan kejuruan (SMK) yang relevan dengan kebutuhan lokal seperti pertanian dan industri, sementara PKBM telah menjadi alternatif yang signifikan untuk meningkatkan literasi orang dewasa dan RLS di daerah-daerah seperti Tanjung Agung dan Sungai Rotan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pola kesenjangan spasial serta perbedaan gender, dapat disimpulkan bahwa hambatan utama terhadap peningkatan RLS di Kabupaten Muara Enim bersifat struktural dan kultural. Masalah inti adalah kurangnya layanan pendidikan menengah di daerah pinggiran, diperparah oleh medan geografis yang sulit, dan tingginya tingkat diskriminasi gender yang dibentuk oleh norma-norma sosial seperti pernikahan dini. Untuk mengatasi masalah ini, studi ini mengusulkan Percepatan Kerangka Kebijakan Tiga Pilar: (1) Pilar Spasial dengan menerapkan Kebijakan Berbasis Wilayah tentang pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) atau satu atap dan akomodasi dukungan tambahan atau transportasi gratis untuk daerah tertinggal; (2) Pilar Kemampuan dan Gender dengan penyediaan beasiswa untuk anak perempuan dan penguatan advokasi tentang pencegahan pernikahan dini; dan (3) Pilar Non-Formal dengan Revitalisasi PKBM digital dan penggabungan pendidikan kesetaraan dengan pelatihan vokasional untuk mempercepat pencapaian RLS kelompok usia dewasa. Pendekatan kolaboratif dan adaptif ini dimaksudkan untuk menyediakan peta jalan strategis guna mencapai target RLS secara berkelanjutan dan adil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Muara Enim atas dukungan dana yang diberikan untuk pelaksanaan riset pada tahun anggaran 2025. Penelitian ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan dana tersebut, dan saya sangat menghargai kepercayaan yang telah diberikan dalam proses penelitian ini. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang sangat berarti dalam penyelesaian penelitian ini. Bantuan, wawasan, dan dukungan mereka sangat berperan penting dalam perjalanan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agista, W., & Hendrawati, T. (2025). Transformasi Pendidikan Menuju Efisiensi dan Kesetaraan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Indonesia. *Action Research Journal Indonesia (ARJI)*, 7(2), 456-482. <https://doi.org/10.61227/arji.v7i2.353>
- Anggraeni, W. (2022). Peran aksesibilitas transportasi dan infrastruktur pendidikan terhadap rata-rata lama sekolah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 20(1), 45–60. <https://doi.org/10.37905/jsep.v2i2.29161>
- Apergis, N., Polemis, M., & Soursou, S. E. (2022). Energy poverty and education: Fresh evidence from a panel of developing countries. *Energy Economics*, 106, 105430 <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105430>.
- BPS. (2024). Statistik Kesejahteraan Rakyat. Badan Pusat Statistik
- Baharin, R., Syah Aji, R. H., Yussof, I., & Mohd Saukani, N. (2020). Impact of human resource investment on labor productivity in Indonesia. *Interdisciplinary Journal of Management Studies*, 13(1), 139-164. <https://doi.org/10.15408/sjie.v11i2.26401>
- Damayanti, A., & Ni'mah, S. Z. (2023). Contextualization of Early Marriage Hadith: Analysis of Marriage Hadith 'Aisha with Sociology Approach. *International Journal of Research*, 1(2), 133-152. <https://doi.org/10.55062/ijr.2023.v1i2/372/5>
- Haidir, A. A., & Setyari, N. P. W. (2023). Indonesia social progress: the role of access to basic education in escaping from poverty trap. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 24(2), 428-457. <https://doi.org/10.18196/jesp.v24i2.19810>
- Hanif, M., & Rijal, S. (2024). Dynamic Socioeconomic Changes and Their Implications on Community Education: A Global Perspective. *Jurnal Terobosan Peduli Masyarakat (TIRAKAT)*, 1(2), 78-88. <https://doi.org/10.61100/j.tirakat.v1i2.172>
- Hufad, A., Purnomo, P., Sulistiono, E., & Najmudin, M. F. (2024). Education Marketplace Pendidikan Masyarakat. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 7(1), 170-182.
- Johnson, J. L., Adkins, D., & Chauvin, S. (2020). A review of the quality indicators of rigor in qualitative research. *American journal of pharmaceutical education*, 84(1), 7120. <https://doi.org/10.5688/ajpe7120>
- Kanval, N., Ihsan, H., Irum, S., & Ambreen, I. (2024). Human capital formation, foreign direct investment inflows, and economic growth: A way forward to achieve sustainable development. *Journal of Management Practices, Humanities and Social Sciences*, 8(3), 48-61. <https://doi.org/10.33152/jmphss-8.3.5>
- Krishnan, S., & Mohanty, N. (2020). Sustainable development as freedom. In *Conservation Landscapes and Human Well-Being* (pp. 37-54). Routledge India. <https://doi.org/10.4324/9781003083597-2>
- Mulyana, S. (2020). Faktor-faktor sosial budaya penyebab pernikahan usia dini dan implikasinya terhadap pendidikan perempuan. *Jurnal Ilmu Sosial*, 15(3), 201–215. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415>
- Priambada, G. A. (2024). Analisis Unemployment Rate, Kemiskinan, Rata-rata Lama Sekolah dan Rasio Gini Terhadap Tingkat Kriminalitas di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2022 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). <https://doi.org/10.20527/jiep.v7i2.220>

- Purnomo, P., Nudiati, D., Lutfiansyah, D. Y., Putra, A. H., & Sulistiono, E. (2024). Learning needs software development in determining community learning needs priority at the community learning center (CLC). *Journal of Nonformal Education*, 10(2). <https://doi.org/10.15294/jone.v10i2.1608>
- Purnomo, P., Wahyudin, U., Hadiapurwa, A., Alawiyah, T., & Pratama, Y. L. (2024). The effectiveness of the blended learning model on artificial intelligence knowledge in digital competency training for non-formal education teachers. *Lembaran Ilmu Kependidikan*, 53(2), 205-212. <https://doi.org/10.15294/lik.v53i2.11999>
- Raikes, A., Rao, N., Yoshikawa, H., Cahrssen, C., Behrman, J., Cappa, C., ... & UKRI GCRF Harnessing the power of global data to support young children's learning and development research group. (2023). Global tracking of access and quality in early childhood care and education. *International Journal of Child Care and Education Policy*, 17(1), 14. <https://doi.org/10.1186/s40723-023-00116-5>
- Sardin., Saripah, I., Purnomo., Hyangsewu, P., Romi, A., (2025). Laporan Kajian Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muara Enim.
- Ubihatun, R., Aliyya, A. I., Wira, F., Ardhelia, V. I., & Radianto, D. O. (2024). Tantangan dan Prospek Pendidikan Vokasi di Era Digital: Tinjauan Literatur. Abstrak: *Jurnal Kajian Ilmu seni, Media dan Desain*, 1(3), 01-11. <https://doi.org/10.62383/abstrak.v1i3.118>
- UNESCO. (2020). *Global education monitoring report 2020: Inclusion and education*. UNESCO Publishing. <https://doi.org/10.54676/jjnk6989>
- Yoshida, Y. H., Rachman, J. B., & Darmawan, W. B. (2022). Upaya Indonesia dalam mengatasi pernikahan anak sebagai implementasi sustainable development goals (SDGs) tujuan 5 (5.3). *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 1(3), 153-166. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i3.44202>